



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA,
EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Persidangan ke-	: I (Satu)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Hari/Tanggal	: Rabu, 4 September 2019
Pukul	: 10.00 s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPF RI
Acara	: 1. Penyerahan Rekomendasi Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komisi X DPR RI 2. Pembahasan RKA-KL TA 2020. 3. Pembahasan Usulan Program-Program yang akan didanai oleh DAK. 4. Lain-lain
Hadir	: 32 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	: Muhadjir Effendy/Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.45 WIB oleh **Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, MM**/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 246 ayat (2) dan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbud RI serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi X DPR-RI menyerahkan Rekomendasi Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komisi X DPR RI kepada Mendikbud RI sebagaimana terlampir. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Panja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komisi X DPR RI, dan menyampaikan perkembangan tindak lanjutnya secara tertulis kepada Komisi X DPR RI.
2. Komisi X DPR-RI menyetujui usulan pagu anggaran Kemendikbud RI pada RAPBN TA 2020 sebesar **Rp35.701.317.485.000,-** (*Tiga puluh lima triliun tujuh ratus satu miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Per Unit Kerja

(dalam rupiah)

NO	UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN TA 2020
1	Sekretariat Jenderal	1.712.765.448.000
2	Inspektorat Jenderal	150.819.770.000
3	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah	19.474.649.720.000
4	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.650.463.169.000
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.014.720.467.000
6	Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	551.557.489.000
7	Direktorat Jenderal Kebudayaan	1.358.482.330.000
8	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	9.787.859.092.000
Total		35.701.317.485.000

3. Dalam Pagu Anggaran sebagaimana disebutkan dalam angka 2 diatas, Kemendikbud RI menyampaikan Program Prioritas **sebesar Rp.27.598.889.357.000,-** (*Dua puluh tujuh triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) **atau 77,3% dari Pagu**, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN
1	Peningkatan Akses Pendidikan	5.423.471.563.000
2	Program Indonesia Pintar	9.694.387.016.000
3	Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	1.938.641.910.000
4	Penguatan Substansi Pendidikan dan Kebudayaan	449.709.859.000
5	Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan	6.857.223.831.000
6	Peningkatan dan Pemerataan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	1.256.464.832.000
7	PAUD, Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Keluarga	409.604.374.000
8	Kebudayaan dan Perfilman	482.415.594.000
9	Bahasa dan Perbukuan	48.196.982.000
10	Penguatan Karakter	225.084.282.000
11	Peningkatan Kualitas SDM	592.713.627.000
12	Pengelolaan dan Dukungan Kebijakan	220.975.487.000
Total		27.598.889.357.000

4. Komisi X DPR-RI menyetujui Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2020 sebesar **Rp135.637.300.000.000,-** (*Seratus tiga puluh lima triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliar rupiah)

DAK	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN
DAK FISIK		18.334,6
	Subbidang PAUD	307,6
	Subbidang SD	6.501,0
	Subbidang SMP	4.492,6
	Subbidang SKB	319,7
	Subbidang SMA	2.718,5
	Subbidang SMK	3.866,0
	Subbidang SLB	129,3
DAK Non-Fisik		117.302,7
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	54.315,6
	Bantuan Operasional PAUD	4.475,5
	Tunjangan Profesi Guru PNSD	53.836,3
	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	992,7
	Tunjangan Khusus Guru PNSD	2.063,7
	Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	1.477,2

	Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya	141,7
--	---	-------

5. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan kepada Kemenkeu RI guna mengklarifikasi:
 - a. penjumlahan anggaran pendidikan dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2020 (Buku II) halaman 4-5 mengenai anggaran pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat, dan Anggaran Pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa serta anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan.
 - b. frasa “Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan” dalam postur anggaran pendidikan sebagaimana tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2020 **sebesar Rp.166,6 triliun agar digunakan hanya untuk bidang pendidikan, termasuk untuk tunjangan guru honorer.**
6. Terhadap persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, Komisi X DPR-RI akan mengajukan ke Badan Anggaran DPR-RI.
7. Terhadap Pagu Anggaran (Sementara) Kemendikbud RI pada RAPBN TA 2020, Komisi X DPR RI menyampaikan:
 - a. Kemendikbud RI melakukan koordinasi dengan Kemenristekdikti RI dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sehingga melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pendidikan.
 - b. Menekankan untuk penguatan pendidikan karakter dan menumbuhkan rasa nasionalisme bagi peserta didik dan masyarakat secara umum, antara lain: dengan mengembangkan atau menguatkan SDM kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan di daerah.
 - c. Kebijakan dan program strategis harus didasarkan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan kondisi dan dinamika masyarakat daerah, seperti kebijakan zonasi dalam PPDB.
 - d. Dalam pembahasan RAPBN TA 2020 kedepan, Kemendikbud RI agar menyajikan data, alokasi anggaran dan sasaran antara lain:
 - Pendidikan Khusus;
 - penguatan literasi;
 - penguatan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
 - sosialisasi dan implementasi peraturan perundang-undangan seperti UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU No.13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - e. Menekankan basis data yang akurat dan terpadu dalam implementasi program dan kegiatan seperti Program Indonesia Pintar.
8. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk menyampaikan data terkait perkembangan rekrutmen Guru Honorer K2, yang diterima sebagai CPNS dan PPPK.

9. Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud RI sepakat untuk mengadakan Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan tema *Grand Design Pendidikan Dasar dan Menengah*.
10. Komisi X DPR RI mengapresiasi Kemendikbud RI yang telah melakukan langkah-langkah strategis melalui program dan kegiatan di Provinsi Papua.
11. Komisi X DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama terhadap program prioritas nasional dan program prioritas Kemendikbud RI TA 2020.
12. Komisi X DPR-RI dan Kemendikbud RI sepakat untuk melakukan RDP untuk pendalaman terhadap Pagu dan Program Anggaran (Sementara) RAPBN TA 2020 Kemendikbud RI pada hari Kamis, 5 September 2019.
13. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk melakukan revisi PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Junto PP No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, agar penanaman dan pementapan nilai Pancasila masuk dalam muatan kurikulum.
14. Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI memberikan jawaban tertulis pada tanggal 16 September 2019.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.25 WIB